

**PERKEMBANGAN JUMLAH SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

KHAIRUDDIN RITONGA
N1M: 54.14.1.038



**PROGRAM STUDI D-111 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M/1438 H

**PERKEMBANGAN JUMLAH SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

KHAIRUDDIN RITONGA
N1M: 54.14.1.038



**PROGRAM STUDI D-111 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M/1438 H

**PERKEMBANGAN JUMLAH SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
TERHADAP TINGKAT PEREKONOMIAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Ahii Madya (D-III)
dalam Ilmu Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara**

OLEH:

KHAIRUDDIN RITONGA

NIM: 54.14.1.038



**PROGRAM ST'UDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M/1438 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Tingkat
Perekenomian Di Kota Medan**

Oleh:

KHAIRUDDIN RITONGA
NIM. 54.14.1.038

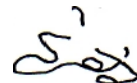
Menyetujui:

**Dosen Pembimbing
D III Perbankan Syariah**



Kamilah, SE. Ak. Msi.
NIP. 197910232008012014

Ketua Program Studi



Zuhri M. Nawawi, MA
NIP. 1.97608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul "**Peranan Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Tingkat Perekonomian di Kota Medan**". telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 27 April 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M.Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

NIP.

Anggota

Penguji I

Penguji II

Kamilah, SE. Ak. Msi.
NIP. 19791020³2008012014

NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairuddin Ritonga
NIM : 54.14.1.038
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 27 Januari 1997
Judul Skripsi : Peranan Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) Terhadap Tingkat Perekonomian
di Kota Medan”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi minor saya tersebut benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2017
Yang bersangkutan

KHAIRUDDIN RITONGA
NIM: 54.14.1.038

IKHTISAR

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR, yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Yang dimaksud sistem diskonto adalah di mana pihak yang memberi Sertifikat Bank Indonesia menerima pembayaran bunganya di muka/seketika itu, dengan ketentuan bunga yang telah diterimanya itu akan diperhitungkan pada saat Sertifikat Bank Indonesia dibayarkan kembali pada tanggal jatuh temponya. Sertifikat Bank Indonesia juga merupakan instrumen BI untuk mengendalikan jumlah uang dalam peredaran dengan mengadakan operasi pasar terbuka (*open market operation*). Dan dengan kebijakan ini jumlah uang dalam peredaran menjadi berkurang. Penerbitan SBI pertama kali pada tahun 1970; kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1984 setelah dikeluarkan Paket Kebijakan, Juni 1983. Adapun tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli surat berharga SBI adalah untuk menyalurkan kelebihan dana; dan apabila diperlukan SBI mudah dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya atau kepada BI, karena SBI diterbitkan atas tunjuk. Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jika kita lihat dari segi perspektif *risk and return* maka la tersebut berada di posisi yang sama-sama kecil, dan dari segi konsep *risk management* jelas ini sangat lebih aman dari timbulnya ketidakpastian risiko dikemudian hari. Dan tentunya seorang *risk adverse* (menjauh dari risiko) akan cenderung memilih SBI sebagai alternatif investasi yang cenderung lebih baik dari yang lainnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, clan yang telah memberikan penulis semangat, kekuatan, dan kesabaran yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Minor ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pimpinan clan tauladan terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman.

Sebagai perwujudan dari proses pendidikan kemahasiswaan, skripsi minor ini disajikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan praktek kerja lapangan (magang) pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Yang dilaksanakan selama 1 bulan (01 Januari s/d 31 Januari 2017), ini juga menandakan salah satu bentuk pendidikan sebagai syarat untuk tugas akhir D3 UIN SU.

Dalam pembuatan dan penyelesaian Skripsi Minor ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Teristimewa Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan segala nikmat yang tak terhitung, mengiringi dan memberikan jalan yang indah, kelancaran dalam menyelesaikan segala urusan serta kemudahan dalam keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu menjadi inspirasi dan kekuatan dalam melakukan kebaikan.
3. Ayahanda, Ibunda dan ketiga Adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan kasih sayang yang tak ada batasnya kepada Penulis
4. Ibu Kamilah, S.E.AK.Msi., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
7. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA dan Ibu Rahmi Syahriza, MA selaku Ketua dan Sekretaris Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga kepada seluruh pengurus D3 yang sangat membantu dan membimbing penulis.
8. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
9. Ibu Elly Sarianti dan Dwita Sri Lestari sebagai pembimbing dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang selalu tekun dan sabar memberikan Penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Seluruh staf dan pegawai KPwBI Provinsi Sumatera Utara yang selalu memberikan dukungan (support) kepada Penulis.
11. Seluruh sahabat-sahabat Praktik Kerja Lapangan Penulis beserta sahabat-sahabat kampus dan luar kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan.
12. Ihsan Irbah Kusuma, Iwan Saputra Ritonga, Maya Indriani, Mawarni, Liya Apriani, Isnaini Pasaribu, Mukkaramah, laila syahfitri, dan teman-teman magang di Bank Indonesia yaitu : Kak Reni Silaen, Kak Togiana Clarisa, Kak Tamara, Bang Oster, Kak Mursyidah Latifah, Kak Keke Tumangger dan teman-teman dari Universitas Indonesia.
13. Sahabat-sahabat yang saya banggakan Ananda Sofyan Efendi, Yolanda Mawaddah, Lisa Indriani, M.Ade Pasha, Neni Osari, dan yang selalu memberikan senyum dan canda tawa menghibur.
14. Kepada adik-adik tersayang di KSEI IQEB UIN Sumatera Utara, yang selalu memberikan semangat dan dukungan buat saya.
15. Kak Pumama Ramadhani Silalahi, Tuty Alawiah, Mauliza Hasti, Umami Syahidah Nasution, Fany Irwoana Effendy, Tri Ulandari, Iqbal Tarmizi Aprilla, M.Hidayaturrizza, M.Rifai Lubis, Mukarramah, dan

seluruh teman-teman D3 Perbankan Syariah Kelas C yang menemani saat perkuliahan. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman D3 Perbankan Syariah yang selalu semangat dalam menimba ilmu.

Demikian penulis skripsi minor ini, sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi minor ini. Penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum, Amin ya Rabbal alamin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 27 April 2017

Penulis

Khairuddin
NIM. 54141038

GLOSARIUM

lender of the last resort (LoLR), yaitu tempat sandaran terakhir peminjaman yang merupakan fungsi dari Bank Sentral. Bentuk pinjaman yang diberikan Bank Sentral kepada Bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang dapat menyebabkan krisis keuangan sistemik di dunia perbankan.

Regional Financial Surveillance (RFS), yaitu pengawasan keuangan regional.

Keuangan Inklusif (Inclusion Finance). Yaitu Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil".

Enabler (pendukung).

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance, yaitu fungsi yang menerapkan penilaian terhadap ekonomi dan fungsi pengawasan terhadap suatu Bank.

potensi kelutan (*potential shock*), yaitu Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

Macroprudential,

RTGS (Real Time Gross Settlement), yaitu penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, dimana rekening peserta dapat di debit/di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. (***contagion risk***), yaitu Risiko yang dapat menular.

Failure to settle (Gagal Bayar)

Law Enforcement (Upaya Penegakan Hukum)

Inflation Targeting Framework. Merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru digunakan.

Kliring (clearing), adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Financial Calculation (hitungan keuangan)

Risk and Return, (Bunga dan Pengembalian)

Risk Management, (pengaturan bunga)

Risk Adverse (menjauh dari risiko),

Expected Return, yaitu return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang.

Risk Free atau bebas risiko,

Open Market Operation, (Operasi Pasar Terbuka)

bilyet depot simpanan (BDS),

Variable Rate Tender. Peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dengan tingkat & diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fixed Rate Tender. Peserta lelang mengajukan pembelian kuantitas dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Facilities repurchase agreement (repo), yaitu transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali.

Maturity Mismatch, (Ketakspadanan Jatuh Tempo)

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| IKHTISAR..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Penelitian | 5 |
| D. Metode Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia..... | 10 |
| B. Dasar Hukum Perbankan Sertifikat Bank Indonesia | 14 |
| C. Karakteristik SBI dan SBIS | 19 |
| D. Tata Cara Transaksi SBI..... | 21 |
| E. Hubungan Tingkat Kurs BI Rate Terhadap SBI..... | 22 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PERITSAHAAN | |
| A. Sejarah Singkat KPwBI Prov Sumut..... | 24 |
| B. Visi, Misi dan Sasaran StratEgis KPtivBI Prov Sumut | 26 |
| C. Makna Logo Bank Indonesia | 29 |
| D. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia..... | 30 |
| E. Tugas dan Produk Pokok Satuan Kerja KPwBI Prov Sumut..... | 35 |
| F. Struktur (Jrganisasi KPzvBI Prov Sumut..... | 37 |
| G. Organisasi Internal KPwBI Prov Sumut | 40 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | HASIL TEMUAN KASUS DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Perkembangan Jumlah (SBI) Terhadap Tingkat Perekonomian Di Kota Medan | 42 |
| | B. Dampak Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Masyarakat Dan Perusahaan Yang Menggunakan | 45 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 47 |
| | B. Saran-Saran | 48 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| | LAMPIRAN | |
| | RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Mekanisme Transaksi Lelang Sertifikat Bank Indonesia..... | |
| 2. Hubungan Risiko dan Expected Return | |
| 3. Logo Bank Indonesia | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Tugas Pokok dan Produk Pokok | |
| 2. Struktur Organisasi dan Jabatan | |
| 3. Pemenang Lelang SBI dan SBIS Periode 19 Maret 2015 | |
| 4. Pemenang Lelang SBI dan SBIS Periode 18-20 Desember 2015 | |
| 5. Kurs BI Rate (Berdasarkan Flasil dari RDG) | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan ataupun pihak-pihak lainnya beserta berkedudukan diluar pemerintah dan lembaga lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.

Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bank indonesia antara lain bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi Bank.¹

Industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup, pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 198³) yang sungguh sangat mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik: disisi pasiva maupun disisi aktiva bank. Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana yang baru.

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba untuk menarik dana masyarakat

¹ Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hal. 5-6.

sebanvak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif matipun konsumtif. Karena bagi sebuah bank, dana merupakan darah dan persoalan paling utama, sehingga tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Berdasarkan pengalaman di tapangan atau bukti- bukti empiris, dana bank yang berasal dari modal sendiri dan ` cadangan modal hanya sebesar 7% sampai dengan 8% dari total aktiva bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80°% sampai dengan 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.²

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkantaya kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank, dimana pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan.

Namun saat ini dimana industri perbankan menghadapi situasi perekonamian yang seolah tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat sedikit tersendat. Pengalaman adanya kredit macet akhir - akhir ini telah memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi danar_ya pada kredit. Oleh karena itu kalangan industri perbankan saat ini cenderung lebih menyukai untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk cadangan sekunder yang dalam hal ini

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta, Prenada Media Group, 2005)

dialokasikan pada surat-surat berharga terutama pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Karena Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak dibatasi oleh permintaan atau kelebihan likuiditas sementara perbankan, sedangkan tingkat suku bunga lebih menjanjikan dengan tingkat risiko yang rendah daripada dialokasikan pada kredit untuk masyarakat. Selain itu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dianggap tidak terbatas, pasarnya luas dan tingkat diskontonya tidak dapat dipengaruhi oleh satu bank manapun yang ikut lelang. Bahkan penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut dapat memberikan pendapatan kepada bank yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank sehingga dalam hal ini bank mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas Bank.³

"Menurut Ketut Rindjin didalam bukunya menyebutkan SBI merupakan instrumen BI untuk mengendalikan jumlah uang dalam peredaran dengan mengadakan operasi pasar terbuka (*open market operation*). Dengan kebijakan ini jumlah uang dalam peredaran semakin berkurang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pertama kali diterbitkan pada tahun 1970, kemudian diperbaharui lagi tahun 1984 setelah dikeluarkan Paket Kebijakan Juni 1983."

Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli surat berharga SBI adalah untuk menyalurkan kelebihan dana; dan apabila diperiukan SBI mudah dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya atau kepada BI, karena SBI diterbitkan atas tunjuk.⁴

³ Ismail, Manajemen Perbankan: dari teori Menuju Aplikasi, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010)

⁴ Rindjin, Ketut. *Peragantar Perbankan dan Lembaga keuangan Bukan Bank*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal: 146-147

Kondisi perekonomian yang semakin kompleks, pengendalian moneter harus dilakukan dengan beberapa instrumen secara bersama-sama, Berbagai instrumen kebijakan moneter dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi variabel-variabel moneter yakni diantaranya:

- Operasi pasar terbuka. Ini melakukan penjualan atau pembelian surat-surat berharga SBI dan SBPU, agar operasi pasar terbuka tersebut menjadi efektif, Bank Indonesia telah mengembangkan instrumen tersebut dengan menambahkan fasilitas *repurchase agreement* (repo) ke masing-masing instrumen, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU repo.
- Fasilitas diskonto. Fasilitas ini disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari, khususnya bank yang menghadapi *maturity mismatch* antara penanam dan pendanaannya. Fasilitas diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat-surat berharga atau penjamin surat berharga. Yang dewasa ini dapat digunakan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diendos oleh bank-bank lain.
- Giro Wajib Minimum (GWM). Pada dasarnya merupakan suatu kebijakan menetapkan batas minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia.

B. Dasar Hukum Perbankan Sertifikat Bank Indonesia

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada pemberlakuan Sertifikat Bank Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus menjadi patokan dalam pemberlakuan tersebut. Ada beberapa dasar hukum yang wajib diterapkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatan investasinya yaitu :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/67/KEPIDIR tanggal 23 Juli 1938 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah
3. PBI No. 10/11/PBU2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
4. SE Bank Indonesia No.6/4/DPIVI tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia

a. Landasan Al-Qur'an

Sebagai bahan pertimbangan dalam hal ini pemberlakuan Sertifikat Bank Indonesia dalam penggunaan transaksi surat berharga secara halal ada beberapa landasan syar'i yang dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat muslim yang ingin menggunakan Sertifikat Bank Indonesia yang berbasis syari'ah hal ini berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

...”Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ". (Al-Baqarah: 275)

Dalam potongan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini turun setelah terbukanya kota mekkah. Sebab turunnya ayat ini adalah sehubungan dengan

pengaduan Sani Mughirah kepada gubernur kota mekkah Atab bin Usaid terhadap Bani Tsaqif tentang utang-utang yang dilakukan dengan riba sebelum turunnya ayat pengharaman riba. Kemudian gubernur mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW melaporkan kejadian tersebut. Surat tersebut dijawab setelah turunnya ayat 278-279 (HR. Abu Ya'la dalam kitab musnadnya dan Ibnu Madah dari Kalabi dari Abi Salih dan Ibnu Abbas).⁵

Dalam literatur-literatur lainnya menurut Muhammad Ali Ash Shabuni ayat ini turun berkaitan dengan pengkusian dua orang yaitu al-Abbas dan Khalid Bin Walid secara riba kepada suku tsacif sampai islam datang, kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Kemudian turunlah ayat: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut...) kemudian Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah! ! Sesungguhnya tiap-tiap riba dari riba jahiliyah harus sudah dihentikan dan pertama kali riba yang aku hentikan ialah riba al-abbas dan setiap penuntutan darah dari darah jahiliyah harus dihentikan dan darah pertama yang kuhentikan ialah darah Rabi'ah bin al-Harits.

Dalam bukunya As-Sha'uuni telah menjelaskan secara rinci akan penafsiran surat al-Baqarah 275. Yang mana sebelumnya bahwa pada surat. inilah riba diharamkan secara keseluruhan (kulliy). Maka dalam kaitannya dengan penggunaan Sertifikat Bank Indonesia, Allah telah memperbolehkan segala macam transaksi jual beli dari segala bentuk, baik jual beli barang secara utuh

⁵ Jar, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: 2015, hal. 47.

maupun berbentuk warkat dan surat berharga lainnya selama dapat terhindar dari maysir perjudian dan penipuan serta praktik riba.⁶

Selain itu jika melakukan praktik jual beli harus memaknai akad sebagai salah satu rukun jual beli, ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu :

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad kalian..." (Al-Maidah:1)⁷

Pada ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah. Sebab turunnya ayat ini adalah Ibnu Jabir meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata: "Al-Hutham bin Hinduwal Bakri datang ke Madinah dengan beberapa untanya yang membawa bahan makanan untuk dijual. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, setelah itu dia masuk islam. Ketika dia keluar dari tempat Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, *'clia datang kepacaku deragar2 wajah orang jahat.Lalu dia pergi a'engan punggung seorang pengkhianat.* Ketika Al-Hatham sampai ke Yamamah, dia keluar dari islam (murtad). Ketika bulan Dzul Hijjah, dia pergi ke Makkah dengan rombongan untanya.Maka Allah menurunkan firman-Nya, *'Wahai orang-orang yang beriman! :tanganlah melanggar syiar-syiar kesucian Allah..'* akhirnya mereka tidak jadi melakukan itu."

Dalam surat al-Maidah tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT, menyeru kepada seluruh kaum mukminin :untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah. Perjanjian yang

⁶ As-Shabuni, :Tafsir fi Zhilalil, Edisi 1, 2013, Depok: Penerbit Gema Insani, hal. 47.

⁷ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahnya,Bandung: 2015, hal. 106.

dimaksud yakni mencakup perjanjian diantara seorang hamba dengan Allah tnaupun dengan sesama manusia terutama dalam kegiatan benuamalah seperti dalam kegiatan jual beli pada Sertifikat Bank Indonesia. Dalam hal ini akad yang dilaksanakan harus dijalankan secara sempurna sehingga akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melaksanakan akad jual beli.

Dan juga berdasarkan hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a yang di: riwayatkan oleh Abu Dawud dan Tinnidzi yang artinya:

"Tunaikanlah amanat itu kepadaci'a orang yang mernberi amanar kepadatnu dan jangan karrau rnengkhianati orang yang menghianatimu". (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi, shahih menurut Hakin dan munkar menurut Abu Hatim Ar-Razi)

Dengain meningkatnya sistem Perbankan serta minat masyarakat yang terus meningkat terhadap kegiatan investasi seperti Sertifikat Bank Indonesia Secara Syari'ah maka Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Eda:ran No. 10/17IDPNUTanggal 31 Maret 2008 Tentang Tata Cara Transaksi Repo SBIS dengan Bank Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Fatwa DSN MUI Tentang Pemberlakuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Adapun fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan pemberlakuan Seriifikat Bank Indonesia termuat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 63/DSN-NI[JI/XII!2007 Ter.tang Sertihkat Bank Indonesia Syariah yaitu isinya:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan bank sentral, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan sektor riil; instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh bank sentral-Bank Indonesia-- berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;

Selain itu instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dipandang belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen pengendalian moneter secara optimal oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk dijadikan petluman. .

Adapun ketentuan umum yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.

4. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Sedangkan Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad :

- a. Mudharabah (Muqaradhadh)/Qiradh
- b. Musyarakah
- c. Ju'alah
- d. Wadi'ah
- e. Qardh
- f. Wakalah

C. Karakteristik SBI dan SBIS

Dalam salah satu instrumen Warkat Bank Indonesia yaitu Sertifikat Bank Indonesia ada beberapa kriteria yang dapat kita ketahui sebagai pembeda dari warkat lainnya. Adapun karakteristik dari surat berharga Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan.
2. Didominasi dari yang terendah Rp 50 juta sampai dengan tertinggi Rp 100 miliar.
3. Penjualan SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50 juta.
4. Pembelian SBI berdasarkan pada nilai tunai yang diperoleh dari nasabah berikut ini.

$$\frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka, Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai
6. Pajak penghasilan (PPh) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%.

Selain Sertifikat Bank Indonesia terdapat juga Instrumen Berharga yang berbasis syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang merupakan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Akad yang digunakan untuk penerbitan S\$IS adalah akad: Mudharabah (Muqaradhadh)/Qiradh, Musyarakah, Ju'alah, Wadiah, Qardh, Wakalah. SBIS yang saat ini sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah.⁸ Adapun karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yakni sebagai berikut:

1. Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,
2. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12. (dua belas) bulan.
3. Diterbitkan tanpa warkat (scripless).
4. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan
5. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.⁹

⁸ Ahmad Itham, *Ini Lho Batik Syariah (Memahami Bank Syariah dengan Mudah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal.294.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009); hal: 218;

D. Tata Cara Transaksi SBI

1. Tata Cara Mendapatkan SBI

Sertifikat Bank Indonesia adalah produk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang merupakan instrument investasi bebas risiko awalnya digunakan Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas rupiah saat ini perorangan atau perusahaan boleh membeli instrumen ini adapun siklus transaksi pembelian SBI adalah:

- a. SBI diperdagangkan setiap hari kamis dan berjangka waktu 28 hari saja dengan jatuh tempo di kamis berikutnya.
- b. Proses pembelian SBI melalui lelang yang dilakukan setiap hari rabu oleh Bank di Indonesia atau broker yang ditunjuk.
- c. Harus menghubungi Bank yang menawarkan SBI.
- d. Setiap hari rabu sore akan ada pengumuman langsung dari BI siapa yang mendapatkan lelang itu dan berapa besar nilai yang diperoleh.¹⁰

2. Tata Cara Penjualan SBI

Untuk memperoleh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ini dapat diperoleh dengan mengikuti tata caranya. Tata cara transaksi penjual SBI adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang.
- b. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa.

¹⁰ Irwan Santoso, <https://www.carajadikaya.com/sertifikat-bank-indonesia-sbi-sebagai-alternatif-investasi/> (diakses pada 07 april 2017)

- c. Lelang SBI diadakan setiap hari rabu dan dapat diikuti oleh seluruh Bank umum, pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan penyelesaian transaksi hari kamis
- d. Dalam pelaksanaan lelang SBI, masing-masing peserta mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai.
- e. Atas transaksi S.BI, pihak pembeli SBI memperoleh fisik warkat SBI. Namun demikian untuk menjaga keamanan BI memberikan penyimpanan fisik warkat berupa hilyet depot simpanan (BDS) SBI kepada pemilik SBI.
- f. Metode lelang penerbitan SBI dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu melalui *Variable Rate Tender* (peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) dan dengan *Fixed Rate Tender* (peserta lelang mengajukan pembelian kuantitas dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).¹¹

E. Hubungan Tingkat Kurs BI Rate Terhadap SBI

Saat ini Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan cukup tinggi maka Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga SBI untuk

¹¹ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, {Bandung: Alfabeta, 2014, hal: 245-246.

meredam kenaikan inflasi. Perubahan tingkat suku bunga SBI akan memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan.

Apabila tingkat suku bunga naik maka secara langsung akan meningkatkan beban bunga. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan.

Selain kenaikan beban bunga, tingkat suku bunga SBI yang tinggi dapat menyebabkan investor tertarik untuk memindahkan dananya ke deposito. Hal ini terjadi karena kenaikan tingkat suku bunga SBI akan diikuti oleh Bank-bank komersial untuk menaikkan tingkat suku bunga simpanan. Apabila tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, tentu investor akan mengalihkan dananya ke deposito. Terlebih lagi investasi di deposito sendiri merupakan salah satu jenis investasi yang bebas risiko. Pengalihan dana oleh investor dari pasar modal ke deposito tentu akan mengakibatkan penjualan saham besar-besaran sehingga akan menyebabkan penurunan indeks harga saham.¹²

¹² Ibrahim Ahmad, <https://JJcalonwisuda.blogspot.com/2017/04/sbi-sertifikat-bank-indonesia.html> (diakses pada 07 April 2017)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara merupakan Cabang dari Bank Indonesia yang berpusat di Jakarta. Awalnya KPw BI Provinsi Sumatera Utara bernama Kantor Bank Indonesia Cabang Medan. Kantor Bank Indonesia Cabang Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Medan merupakan kantor Cabang De Javasche Bank yang ke- 11. Pembukaan KPwBi Provinsi Sumatera Utara, Tanjung Balai dan Tanjung Pura sebagai kebutuhan untuk menunjang keputusan kebijakan moneter pemerintah Hindia Belanda (atas usul *De Javasche Bank*) yang ketika itu memberlakukan *Guldenisasi* bagi Karesidenan Pantai Timur Sumatera.

Bank sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi Bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral adalah sebagai *Bank circulation, bank to bank and lender of last resort*.¹³

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

Dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia;
2. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini;
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Dengan berkembangnya kegiatan KPwBI Provinsi Sumatera Utara dan adanya pengaruh resesi dunia tahun 1930-an, maka kantor Cabang Tanjung Pura dan Tanjung Balai akhirnya ditutup. Pada saat berdirinya, KPwBI Provinsi Sumatera Utara menempati sebuah bangunan sementara. Untuk gedung kantor yang permanen atas petunjuk pemerintah disediakan sebidang tanah yang dekat *Esplanade* (lapangan umum) yang pembangunannya diharapkan dapat dilaksanakan sebelum selesainya politik moneter "*Guldenisasi*" karesidenan pantai Timur Sumatera.

Untuk persiapan pendirian kantor-kantor di Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor kedua tempat itu. Rencana pembangunan gedung kantor yang permanen bagi KPwBI Provinsi Sumatera Utara dilakukan bersamaan dengan perluasan tahap kedua gedung Kantor Pusat (Jakarta Kota) pada 1912 yang

sekaligus juga merencanakan pembangunan bangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama yang mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin pertama KPwBI Provinsi Sumatera Utara adalah M.Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan KPwBI Provinsi Sumatera Utara adalah M.Rifai, dan pemimpin KPwBI Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sekarang adalah Bapak Arief Budi Santoso yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Divi A. Johansyah.

B. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

1. Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.¹⁴

2. Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektifitas pengelolaan uang rupiah (PUR) dan kehandalan sistem pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang

¹⁴ Booklet Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, hal. 14

inklusif dan berkesinambungan.¹⁵ Dan ada beberapa misi Kantor

Perwakilan Bank Indonesia yang lebih signifikan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.¹⁶

¹⁵ Booklet Surat Edaran Bank Indonesia No.18/81/Intern, "Perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok A", Lampiran - IA, (Jakarta, 30 September 2016), hal. 1.

¹⁶ Ibid.

3. Sasaran Strategis Bank Indonesia

- a. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
- b. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran.
- c. Menjaga stabilitas nilai tukar.
- d. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung ekonomi daerah.
- e. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
- f. Pengelolaan keuangan satuan kerja secara efektif dan efisien.
- g. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP.
- h. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
- i. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang efektif kepada stakeholder.
- j. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- k. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten.
- l. Memperkuat organisasi dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkoinpetensi tinggi dengan dukungan Budaya Kerja yang berbasis pengetahuan.

C. Makna Logo Bank Indonesia

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki logo atau lembaga yang memiliki marna tersendiri yang biasanya menunjukkan cita-cita pendirian, visi dan misi dari perusahaan tersebut, demikian halnya dengan Bank Indonesia mempunyai logo.



Gambar 3 : Logo Bank Indonesia

Arti logo bagi perusahaan selain sebagai lambang juga berfungsi sebagai identitas yang dimiliki karakter dari suatu perusahaan. Bagi Bank Indonesia, pemasangan logo BI akan sangat membantu strategi komunikasi dalam menyertakan dirinya sebagai bagian dari sistem perbankan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain.

Logo Bank Indonesia mencantumkan nilai keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan. Keseimbangan, keteraturan dan kesempurnaan termasuk dalam aspek yang terdapat dalam kestabilan nilai rupiah.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Adapun tugas pokok Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter melalui beberapa cara antara lain :

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing;
- b. Penetapan nilai diskonto;
- c. Penetapan cadangan wajib minimum;
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan;

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Secara sederhana dapat dijelaskan beberapa tugas dari sistem pembayaran yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi, serta mengeluarkan dan mengedarkan uang.

3. Mengatur dan mengawasi Bank-Bank yang lain

Pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu (pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (pasal 25).

4. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas

kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar ketrangan serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kondisi ketidakseimbangan keuangan bersumber dari proses intermediasi yang mengalami gangguan. Salah satu usaha untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah melalui kebijakan makroprudential. Hal tersebut dilakukan untuk menggantikan tugas mengatur dan mengawasi bank yang sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Kebijakan makroprudential secara umum adalah kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank

Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menuiari (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem *RTGS (Real Time Gross Settlement)* yang dapat lebih meningkatkan keamanan aan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki . informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pernayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjumya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

E. Tugas Pokok dan Produk Pokok Satuan Kerja KPwBI Provinsi Sumatera Utara

Table 1 : Tugas Pokok dan Produk Pokok

| Tugas Pokok | Produk Pokok |
|--|--|
| Melaksanakan fungsi <i>advisory</i> kebijakan kepala daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. | Terlaksananya fungsi <i>advisory</i> kebijakan kepada kepala daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. |
| Melaksanakan fungsi <i>Regional Financial Surveillance</i> (RFS) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. | Terlaksananya fungsi TFS dalam rangka mendukung stabilitas system keuangan. |
| Melaksanakan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah. | Terlaksananya pengumpulan data dan penyusunan statistic ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah. |

| | |
|---|--|
| Melaksanakan Fungsi PUR meliputi perencanaan, pendistribusian dan pengelolaan uang, serta layanan kas. | Terlaksananya fungsi PUR meliputi perencanaan, pendistribusian dan pengelolaan uang, serta layanan kas. Termasuk administrasi dan penanganan uang palsu (upal). |
| Melaksanakan fungsi SP. | Terlaksananya fungsi SP secara aman, efisien, handal dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. |
| Melaksanakan fungsi pengawasan SP dan PUR. | Terlaksananya fungsi pengembangan SP dan PUR meliputi perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku SP dan PUR. |
| Melaksanakan fungsi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Inklusif (KI). | Terlaksananya fungsi pengembangan UMKm dan KI untuk mendukung pengendalian inflai dan pengembangan ekonomi daerah. |
| Melaksanakan fungsi komunikasi kebijakan Bank Indonesia. | Terlaksananya fungsi komunikasi dan kebijakan kepada <i>stakeholder</i> daerah secara efektif dan mendukung fungsi <i>advisory</i> kebijakan Bank Indonesia, serta berkontribusi dalam membentuk dan mengelola ekspektasi positif. |
| Melaksanakan dan mengelola fungsi <i>enabler</i> (pendukung) | Terlaksananya dan terkelolanya fungsi pendukung Sumber Daya Manusia (SDM), kesekretariat, teknologi informasi, perencanaan program kerja kerja dan anggaran, logistik, serta keprotokolan dan pengamanan. |
| Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas ke Departemen Regional, serta <i>monitoring</i> dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Provinsi Sumatera Utara. | <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas kepada Departement Regional b. Terlaksananya <i>monitoring</i> dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas KPwDN Kota/Kab. Dibawahnya. |

Sumber: KpwBI Provinsi Sumatera Utara, 30 September 2016

F. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Secara struktural, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala perwakilan (Direktur Eksekutif). Dalam menjalankan tugasnya pemimpin Bank Indonesia dibantu oleh seorang deputi kepala perwakilan (Direktur) yang mengkoordinir bidang-bidang yang ada pada kantor Bank Indonesia kelompok A, struktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.¹⁷

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 grup dan 4 divisi dalam mengembangkan ekonomi Sumatera Utara. Adapun hal tersebut yaitu:¹⁸

1. Grup *Advisory* dan Pengembangan Ekonomi, grup ini terdiri dari:

a. Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan

- Fungsi Data dan Statistik.Ekonomi dan Keuangan
- Fungsi *Assesmen* Ekonomi dan *Surveillance*

b. Divisi Pengembangan Ekonomi

- Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
- Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

¹⁷ Booklet Bank Indonesia, Pada tanggal 30 September 2016, hat. C-2.

¹⁸ Booklet Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/81/Intern, Lampiran - IC, hal. 4.

c. Grup SP, PUR, Layanan dan Administrasi, grup ini terdiri dari:

1) Divisi SP dan PUR

a) Tim PUR dan Operasional SP

- Unit Distribusi Uang
- Unit Layanan dan Administrasi Kas
- Unit Pengolahan Uang
- Unit Operasional SP

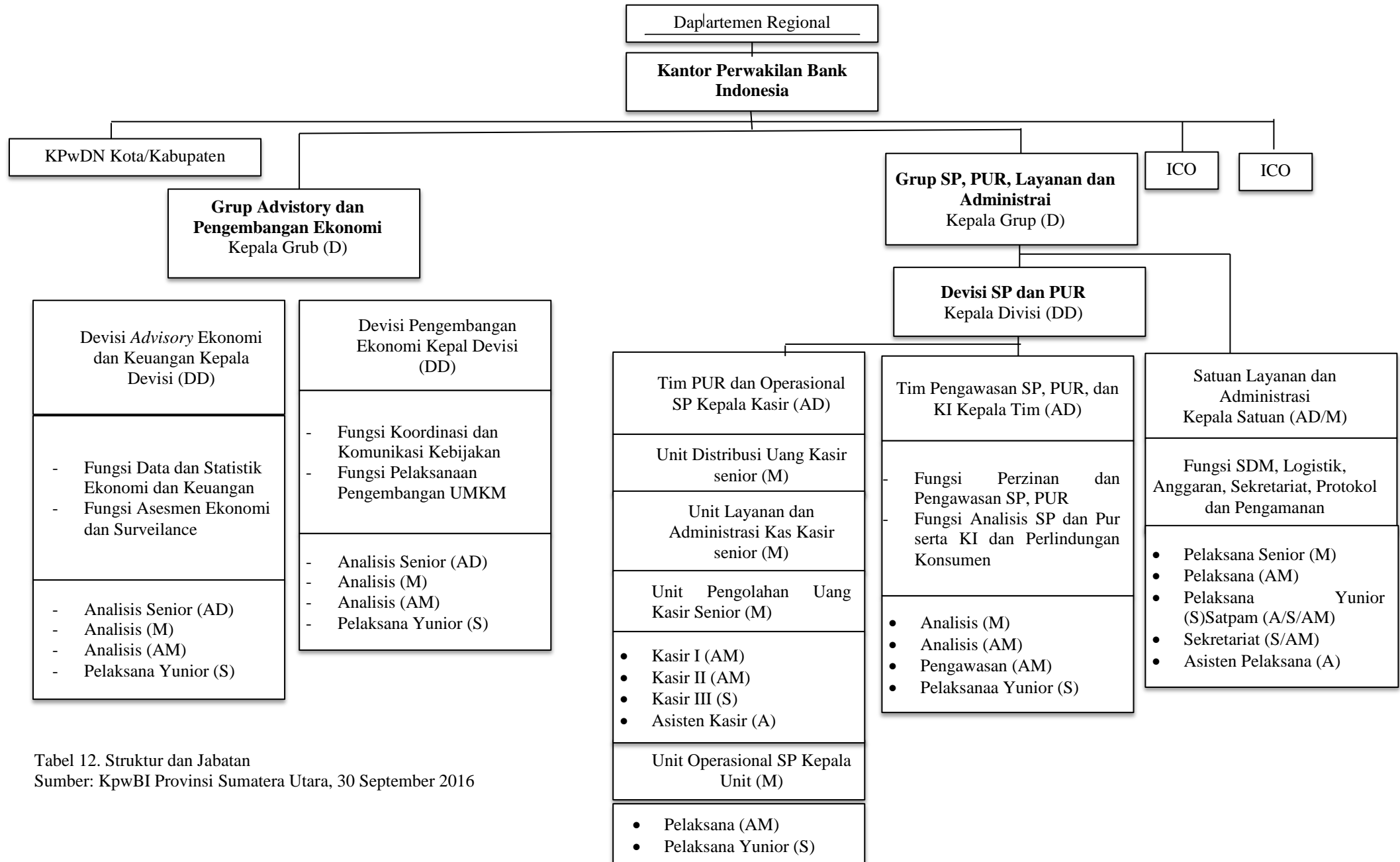
b) Tim Pengawasan SP, PUR dan KI

- Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP dan PUR
- Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

2) Satuan Layanan dan Administrasi

- Fungsi SDK Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROFINSI SUMATERA UTARA



Tabel 12. Struktur dan Jabatan

Sumber: KpwBI Provinsi Sumatera Utara, 30 September 2016

G. Organisasi Internal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Pegawai serta Pensiunan Pegawai Bank Indonesia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Kegiatan tersebut terhimpun dalam beberapa organisasi internal Bank Indonesia yaitu:

1. IPEBI (Ikatan Pegawai Bank Indonesia)

IPEBI merupakan wadah untuk menyalurkan minat serta bakat pegawai Bank Indonesia dalam bidang olahraga, seni maupun kerohanian. Berbagai kegiatan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkala menyesuaikan dengan jadwal serta jumlah peserta yang aktif.

2. PIPEBI (Perhimpunan Istri Pegawai Bank Indonesia)

Istri pegawai juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PIPEBI. Kegiatan tersebut juga ada diantaranya yang dapat membantu mendukung kelancaran kegiatan resmi di kantor Bank Indonesia misalnya membantu dalam pelaksanaan acara seminar atau pertemuan-pertemuan di Bank Indonesia. Disamping itu juga PIPEBI secara rutin mengadakan acara penyuluhan dengan narasumber dan instansi-instansi terkait.

3. PPBI (Perhimpunan Pensiunan Bank Indonesia)

PPBI adalah sarana bagi para pensiunan pegawai Bank Indonesia untuk tetap saling menjalin persaudaraan baik antar pensiun maupun pensiunan dengan pegawai.

4. KOPEBI (Koperasi Pegawai Bank Indonesia)

Keberadaan koperasi pegawai Bank Indonesia sangat membantu para pegawai dalam hal pemenuhan kebutuhan. Selain itu KOPEBI juga melayani simpan pinjam kepada setiap anggotanya.

BAB IV

TEMUAN DAN PERMASALAHAN

A. Perkembangan Jumlah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Tingkat Perekonomian Di Kota Medan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31167/KEP/DIR, Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Dalam hal ini Sertifikat Bank Indonesia sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian.

Sesuai dengan beberapa kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam penentuan pelelangan Sertifikat Bank Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi indikator pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Sumatera Utara, salah satunya penggunaan instrumen investasi seperti Sertifikat Bank Indonesia yang menggunakan Tingkat Suku Bunga atau *BI-Rate* dalam menentukan kualitas serta persentasi dari setiap pembelian dan penjualan pelelangan.

Berikut merupakan data yang saya ambil mengenai hasil pelelangan Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diukur berdasarkan frekuensi dan nominal yang ditawarkan terhadap pemenang lelang pada periode 2015-2016 :

Tabel 13: Pada Periode 19 Maret 2015

Pemenang Lelang SBI Dan SBIS Ditetapkan Sbb:

| Tanggal Lelang | 19 Maret 2015 | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Piranti | SBI | SBIS |
| Jangka Waktu | 9 bulan (273 hari) | 9 bulan (274 hari) |
| Tanggal Setelmen | 20 Maret 2015 | 19 Maret 2015 |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Tanggal Jatuh Waktu | 18 Desember 2015 | 18 Desember 2015 |
| Target Indikatif (miliar) | Rp. 8.000,00 | Rp. 750,00 |
| Nominal Penawaran (miliar) | Rp. 9.996,00 | Rp. 770,00 |
| Kisaran Bid Rate | 6,50%-6,90% | - |
| Frekuensi Penawaran | 83 | 6 |
| Nominal Pemenang (miliar) | Rp. 7.999,999 | Rp. 770,00 |
| Stop Out Rate (SOR) SBI | 6,68% (<i>propo</i> 22,34%) | - |
| Diskonto rrt SBI | 6,65157% | - |
| Tingkat Imbalan SBIS | | 6,65157% |

Tabel 14: Pada Periode 18 Desember 2015

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Tanggal Lelang | 18 Desember 2015 | |
| Piranti | SBI | |
| Jangka Waktu | 9 bulan (273 hari) | 12 bulan (364 hari) |
| Tanggal Setelmen | 18 Desember 2015 | 18 Desember 2015 |
| Tanggal Jatuh Waktu | 16 September 2016 | 16 Desember 2016 |
| Rate | 7,10% | 7,15% |
| Nominal Penawaran (miliar) | Rp. 2.150,00 | Rp. 640,00 |
| Frekuensi Penawaran | 22 | 7 |
| Nominal Pemenang (miliar) | Rp. 2.150,00 | Rp. 640,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Tanggal Lelang | 20 November 2015 | |
| Piranti | SBIS | |
| Jangka Waktu | 9 bulan (273 hari) | 12 bulan (364 hari) |
| Tanggal Setelmen | 18 Desember 2015 | 18 Desember 2015 |
| Tanggal Jatuh Waktu | 16 September 2016 | 16 Desember 2016 |
| Rate | 7,10% | 7,15% |
| Nominal Penawaran (miliar) | Rp. 455,00 | Rp. 100,00 |
| Frekuensi Penawaran | 3 | 1 |
| Nominal Pemenang (miliar) | Rp. 455,00 | Rp. 100,00 |

Keterangan:

- Tenor dalam jwnlah hari
- Target indikatif keseluruhan, jumlah penawaran yang, jumlah penawaran yang diserap dalam miliar.
- Kisaran bid rure , $SOR \sim RRT$; SBI hasil lelang, tingkat imbalan SBIS dalam % (persen)
- Frekuensi penawaran iPlang dalam unit transaksi.

Hasil ini berdasarkan tingkat tenor dalam jumlah hari dengan inelihat nilai tingkat suku bunga yang disesuaikan per harinya sesuai Kurs *BI-Rate* Periode 2015-2016 sebagai berikut:

Tabe15: BI Rate

(Berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Gubernur)

| TANGGAL | BI Rate | Siaran Pers |
|-------------------|---------|---------------------|
| 21 Juli 2016 | 6.50% | Pranala Siaran Pers |
| 16 Juni 2016 | 6.50% | Pranala Siaran Pers |
| 19 Mei 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 21 April 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Maret 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 18 Februari 2016 | 7.00% | Pranala Siaran Pers |
| 14 Januari 2016 | 7.25% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Desember 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Nopember 2015 | 7.50 % | Pranala Siaran Pers |
| 15 Oktober 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 September 2015 | 7.50% | Pranaia Siaran Pers |
| 18 Agustus 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 14 Juli 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| | | |

| | | |
|------------------|--------|---------------------|
| 18 Juni 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 19 Mei 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 14 April 2015 | 77.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Maret 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Februari 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 15 Januari 2015 | 7.75% | Pranala Siaran Pers |

Sumber: www.bi.go.id

Dari sini nantinya akan disesuaikan dengan perhitungan tenor yang akan dikalkulasikan dengan persentase dari masing-masing frekuensi pada saat pemenangan lelang Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku saat itu.

B. Dampak Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Masyarakat Dan Perusahaan Yang Menggunakan.

Bagi masyarakat sendiri, tingkat suku bunga yang tinggi yang diterapkan pada investasi Sertifikat Bank Indonesia sangat berdampak pada perkembangan perekonomian di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat berinvestasi terhadap surat berharga ^{Him}, kemudian Negara mengalarzii tinbkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan tingkat konsumsi rill masyarakat yang berkurang, karena kebutuhan yang semakin berkurang maka akan menyebabkan tingl:at perekonomian di sumatera utara khususnya di kota medan mengalami penurunan.

Selain itu apabila uar.g yang ada di masyarakat tidak digunakan sebagaimana biasanya maka kecenderungan untuk mengkonsumsi produk perusahaan juga akan berkurang, maka hal ini akan menyebabkan tingkat pendapatan pada perusahaan semakin berkurang dan terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan sepperri pemutusan hubungan kerja (PHK)/pemecatan karyawan

secara massal ataupun pengurangan bahan baku produksi untuk menekan pendapatan perusahaan. Siklus inilah yang nantinya akan mengganggu sistem perekonomian yang ada di Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Dalam hal ini Sertifikat Bank Indonesia sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Peran jumlah Sertifikat Bank Indonesia terhadap perekonomian Sumatera Utara khususnya di Kota Medan terlihat sangat signifikan hal ini berdasarkan kepada persentase yang dihasilkan pada hasil penjualan Sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia pada periode 2015-2016 yang pertumbuhannya sebesar 1,75 %. Hal ini terlihat pada tingkat BI Rate yang berlaku pada tanggal 18 Desember 2015 untuk kategori Sertifikat Bank Indonesia sedangkan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah peningkatannya sebesar 1,24 % dan ini semakin membuktikan bahwa Sertifikat Bank Indonesia bisa meningkatkan perekonomian Indonesia dengan peningkatan investasi yang berjalan baik.

Selain itu dengan adanya Sertifikat Bank Indonesia ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi di masyarakat maupun bagi perusahaan sehingga masyarakat dapat merasakan keuntungan dan manfaat dari pengelolaan Sertifikat Bank Indonesia yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Sehingga dapat memberikan kontribusi besar bagi pemerintahan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian di

Indonesia terlebih terhadap siklus ekonomi di Sumatera Utara yang semakin berkembang.

B. Saran

Kesimpulan diatas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran-saran kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara terutama dengan perusahaan-perusahaan dan masyarakat di Kota Medan yang menggunakan Sertifikat Bank Indonesia sebagai alat untuk investasi, saran yang dapat penulis berikan pada pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai badan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga tingkat suku bunga atau *BI Rate* secara stabil, sebaiknya pihak Bank Indonesia terus mempertahankan dan meningkatkan kesadaran akan investasi dikalangan masyarakat awam khususnya. Bukan hanya pada perusahaan-perusahaan sistem perbankan, namun juga menjangkau seluruh aspek lini perekonomian diseluruh Indonesia khususnya Sumatera Utara, terutama dalam pengembangan investasi Sertifikat Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu tolak ukur peningkatan kegiatan investasi di Indonesia, karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kegiatan investasi.

2. Bagi Perusahaan ataupun Organisasi-Organisasi yang menjalankan kegiatan investasi terkhusus memakai Sertifikat Bank Indonesia maupun Sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk terus meningkatkan jumlah Investasinya di sektor-sektor industri dan pembangunan sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terkait.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengbunaaan Sertifikat Bank Indonesia yang telah saya paparkan dan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shabuni, *Tafsir fi Zhailalil*, Edisi 1, Depok: Penerbit Gema Insani, 2013.
- Booklet Bank Indonesia, Pada tanggal 30 September 2016.
- Booklet Surat Edaran Bank Indonesia No.18/ 81/ Intern, "Perihal Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri Kelompok A", Lampiran - IA, Jakarta: 30 September 2016.
- Booklet Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/81/Intern, Lampiran - IC.
- Booklet Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara*,
- Fahmi, *Iiham. Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hadi. Amirul. *Metodologi Penelitian pendidikan*, Bandomg: Pustaka Setia, 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Ifham, Ahinad. *Ini Lho Bank Syariah Menaahafni Bank Svariah dengan Mudah*, Jakarta: Pl. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Irwan Santoso, <https://iwwNv.carajadikaya.com/sertifikat-bank-indonesia-sbi-sebagai-alternatif-investasi/> (diakses pada 07 april 2017).
- Ismail. *Manajemen Perbankan: dari teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Jart, *AZ-Qur'an dan T'erjemahnya*, Bandung: 2015.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Sulistyaningsih, *Metodologi Penelitian Kebidanan: Kuantitatif kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

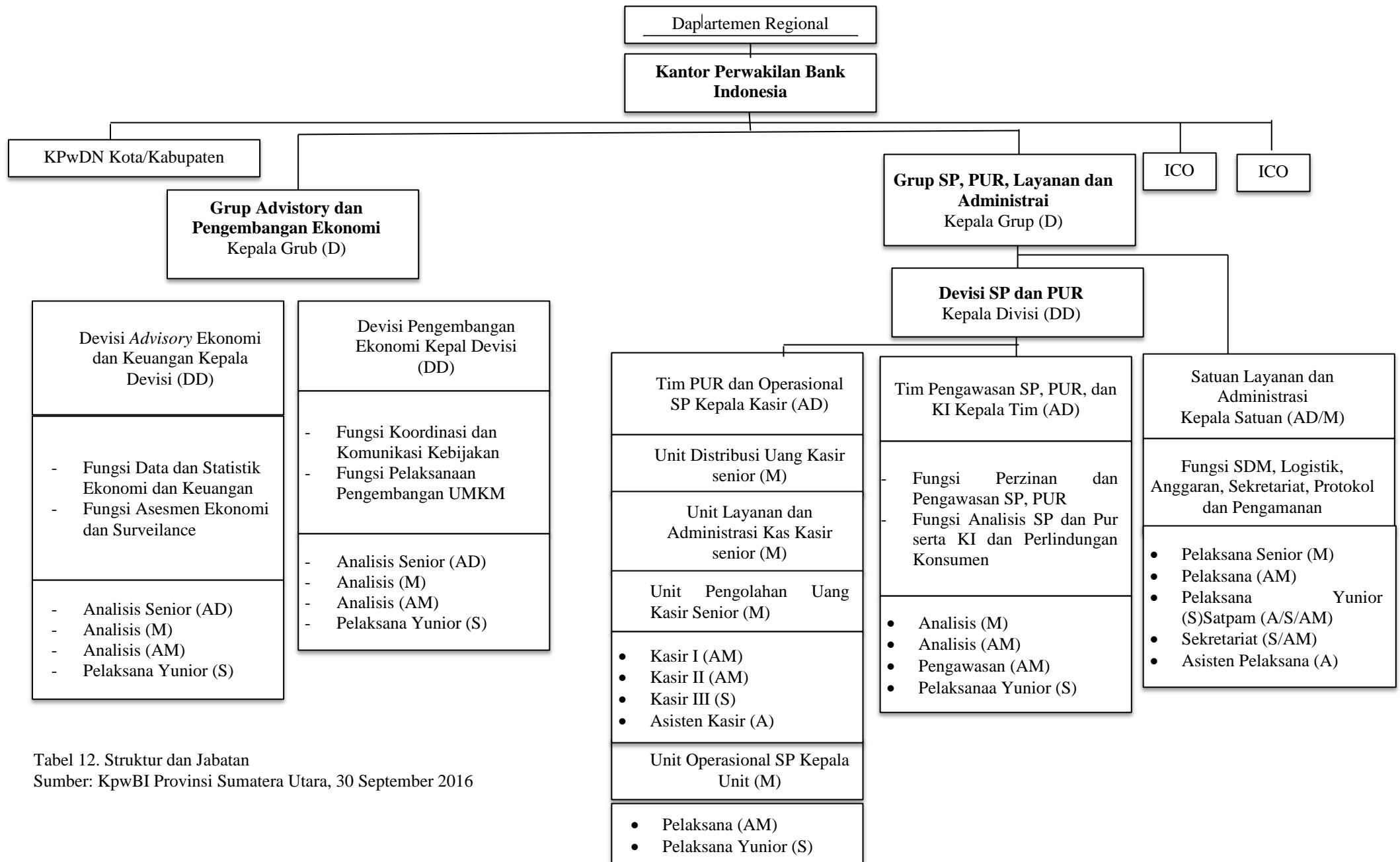
Undang-Undang Tentang Bank Indonesia, Bandung: Citra Umbara: 2009.

Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

<https://calonwisuda.blogspot.com/2014/10/sbi-sertifikat-bank-indonesia.html>
(diakses pada 07 April 2017).

| TANGGAL | BI Rate | Siaran Pers |
|-------------------|---------|---------------------|
| 21 Juli 2016 | 6.50% | Pranala Siaran Pers |
| 16 Juni 2016 | 6.50% | Pranala Siaran Pers |
| 19 Mei 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 21 April 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Maret 2016 | 6.75% | Pranala Siaran Pers |
| 18 Februari 2016 | 7.00% | Pranala Siaran Pers |
| 14 Januari 2016 | 7.25% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Desember 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Nopember 2015 | 7.50 % | Pranala Siaran Pers |
| 15 Oktober 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 September 2015 | 7.50% | Pranaia Siaran Pers |
| 18 Agustus 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 14 Juli 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| | | |
| 18 Juni 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 19 Mei 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 14 April 2015 | 77.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Maret 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 17 Februari 2015 | 7.50% | Pranala Siaran Pers |
| 15 Januari 2015 | 7.75% | Pranala Siaran Pers |

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROFINSI SUMATERA UTARA



Tabel 12. Struktur dan Jabatan

Sumber: KpwBI Provinsi Sumatera Utara, 30 September 2016

Pemenang Lelang SBI Dan SBIS:

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Tanggal Lelang | 19 Maret 2015 | |
| Piranti | SBI | SBIS |
| Jangka Waktu | 9 bulan (273 hari) | 9 buian (274 hari) |
| Tanggal Setelmen | 20 Maret 2015 | 19 Maret 2015 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tanggal Jatuh Waktu | 18 Desember 2015 | 18 Desember 2015 |
| Target Indikatif (miliar) | Rp. 8.000,00 | Rp. 750,00 |
| Nominal Penawaran (miliar) | Rp. 9.996,00 | Rp770,00 |
| Kisaran Bid Rate | 6,50%-6,90% | - |
| Frekuensi Penawaran | 83 | 6 |
| Nominal Pemenang (miliar) | Rp7.999,999 | Rp. 770,00 |
| Stop Out Rate (SOR) SBI | 6,68% (<i>propo 22,34%</i>) | - |
| Diskonto rrt SBI | 6,65157% | - |
| Tingkat Imbalan SBIS | | 6,65157% |